

ABSTRAK

Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. Di jelaskan lebih lanjut bahwa Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan ikan tawar, ikan air payau dan ikan air laut. Setiap Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terdapat para Pembudi Daya Ikan yang jenis budidayanya berbeda- beda dalam melakukan pembudidayaan, salah satunya di Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan pada Bidang Kelautan dan Perikanan yang menaungi tentang Pembudi Daya Ikan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo telah melaksanakan pemberian perlindungan terhadap pembudi daya ikan dengan diberikannya fasilitas kebutuhan usaha berupa fasilitas pemberian bahan bakar solar, bahan bakar bensin dan pemberian obat-obatan secara cuma-cuma bagi ikan yang terkena penyakit. Terdapat pula beberapa hambatan, yaitu: tanah untuk budidaya tambak udang masih milik Negara, status tanah belum jelas, dahulu dikelola bekas aneka tambang, adanya keterbatasan tenaga pekerjanya, kurangnya benih ikan yang didapatkan, terbatasnya bahan bakar minyak dan solar dan dari faktor geografisnya. Saran yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo hendaknya meningkatkan lagi fasilitas kebutuhan usaha dan lebih memperhatikan pembudi daya kan mengenai benih ikan agar tidak membeli di luar Kabupaten Purworejo.

Kata Kunci: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Perlindungan Pembudi Daya Ikan, Kabupaten Purworejo